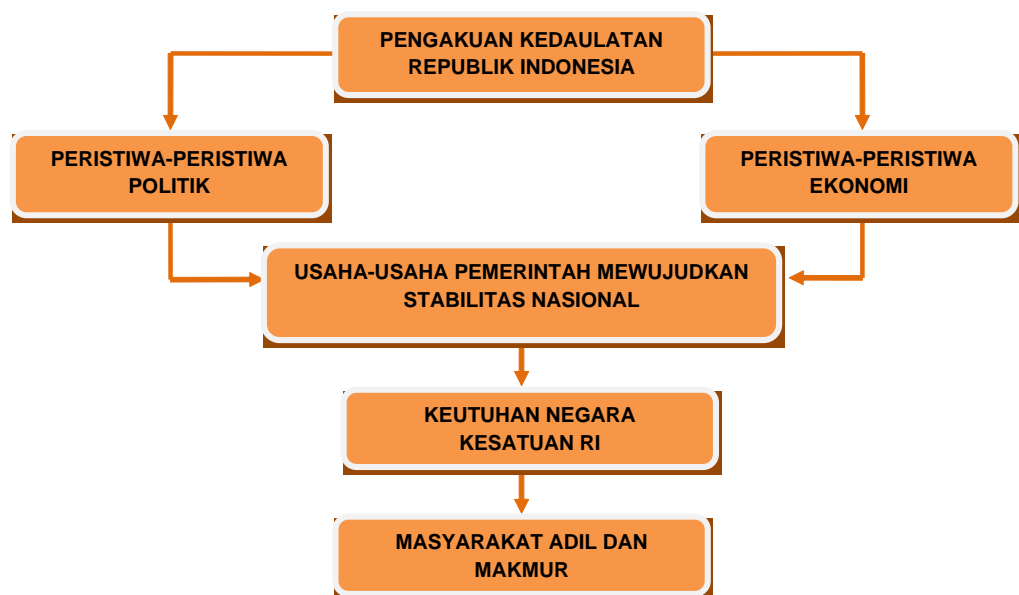


## PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

Setelah mempelajari Bab ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk menyebutkan peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia antara tahun 1950-1965, serta menjelaskan hubungannya dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### PETA KONSEP



### KATA KUNCI

Kedaulatan, demokrasi, politik, ekonomi, liberal, serikat, terpinpin, perjuangan, diplomasi, seperatis, integrasi, kerja sama, keadilan, dan persamaan.

Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia telah dilalui dengan sangat berat, baik perjuangan fisik maupun diplomasi. Berbagai pertempuran antara tentara dan rakyat Indonesia dengan tentara Belanda terjadi di mana-mana. Perjuangan diplomasi sebagai alternatif untuk menyelesaikan

masalah antara RI dan Belanda, akhirnya mengalami kegagalan karena Belanda selalu mengingkari isi perjanjian yang telah ditandatangani.

Sebagai langkah untuk menyelesaikan pertikaian antara RI dan Belanda, UNCI memprakarsai diselenggarakannya KMB yang diikuti delegasi dari RI, FBO, dan Belanda. Salah satu isi KMB adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Apakah pengakuan kedaulatan pemerintah Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia dapat diartikan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah selesai? Tentu tidak, karena bangsa Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan menuju kehidupan yang demokratis, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Beberapa peristiwa politik dan ekonomi yang terjadi pasca pengakuan kedaulatan merupakan bukti perjuangan panjang bangsa Indonesia.

## A. Terbentuknya RIS

Sebagai realisasi dari perjanjian Roem-Royen, UNCI memprakarsai diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Konferensi berlangsung dari tanggal 23 Agustus – 2 Nopember 1949. Konferensi diikuti delegasi dari RI, FBO, dan Belanda.

Pada tanggal 4 Agustus 1949, pemerintah RI membentuk delegasi untuk mengikuti KMB yang terdiri dari Drs. Moh. Hatta (Ketua), dan para anggota: Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Supomo, dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel TB Simatupang, dan Mr. Muwardi. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak. Delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. Van Maarseveen. Sedangkan yang bertindak sebagai penengah adalah wakil dari UNCI yang terdiri dari Critley, R. Heremas, dan Merle Conhran.

Hasil dari KMB adalah sebagai berikut:

1. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali;
2. Indonesia akan membentuk negara sekrikat (RIS) dan merupakan uni dengan Belanda;
3. RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan konsesi atau jaminan dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan Belanda;
4. RIS harus menanggung semua hutang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942;
5. Status Karesidenan Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Sementara KMB sedang berlangsung, RI dan FBO menandatangani perjanjian tentang Konstitusi RIS pada tanggal 29 Oktober 1949. Perjanjian itu dituangkan dalam sebuah piagam yang ditandatangani wakil-wakil RI dan negara-negara atau daerah-daerah yang akan menjadi anggota RIS. Berdasarkan Konstitusi RIS, negara berbentuk federasi dan terdiri dari daerah-daerah di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Negara RI yang meliputi seluruh wilayah menurut Perjanjian Renville;
2. Negara-negara bentukan Belanda menurut hasil Konferensi Malino, yaitu:

- a. Negara Indonesia Timur (NIT) dengan Cokorde Gde Sukowati sebagai Presiden dan Najamudin Daeng Maewa sebagai PM,
  - b. Negara Sumatera Timur dengan Dr. Mansyur sebagai wakilnya,
  - c. Negara Sumatera Selatan dengan Abdul Malik sebagai walinya,
  - d. Negara Madura dengan Cokroningrat sebagai walinya,
  - e. Negara Jawa Timur dengan Wiranata Kusumah sebagai walinya.
3. Satu satuan negara yang tegak sendiri;
  4. Daerah-daerah selebihnya bukan daerah bagian.



**Gambar. 4.1** Assat Berpidato sebagai Ketua KNIP

Konstitusi RIS merupakan kesepakatan dan kebulatan tekad antara RI dan FBO untuk bersatu.

Sementara, KNIP mengadakan sidang untuk membahas hasil-hasil KMB pada 6 – 14 Desember 1949. Sidang yang dihadiri 325 anggota KNIP berhasil mengambil keputusan bahwa KNIP dapat menerima hasil KBM melalui pemungutan suara, di mana 226 suara menyatakan setuju. 62 suara menolak, dan 31 suara meninggalkan sidang.

Sebagai tindak lanjut hasil KBM,

terdapat beberapa peristiwa penting, seperti:

1. Pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno;
2. Pada tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno dipilih Presiden RIS;
3. Pada tanggal 17 Desember 1949 Ir. Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS;
4. Pada tanggal 20 Desember 1949 Presiden Soekarno melantik Kabinet RIS yang pertama dengan Drs. Moch. Hatta sebagai PM.

*Pada tanggal 14 Desember 1949 Wakil-wakil Pemerintah RI, Negara Bagian, Daerah-daerah yang menjadi bagian RIS, KNIP, dan DPR dari masing-masing Negara Bagian mengadakan Musyawarah Federal untuk Menyetujui Naskah Konstitusi RIS.*

Pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi RIS yang dipimpin Drs. Moch. Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan secara bersamaan, baik di Indonesia maupun di Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

1. Di ruang istana Kerajaan Belanda; Ratu Juliana, PM Dr. William Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A Sassen, dan Ketua Delegasi RIS Drs. Moch. Hatta secara bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan tersebut;

2. Di Jakarta; Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda, A.H.J. Lovink dalam suatu upacara secara bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan tersebut;
3. Pada waktu yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan RI kepada RIS.

Ternyata, pembentukan RIS tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Masalah itu bukan saja berasal dari sikap pemerintah Belanda yang tidak konsisten dalam melaksanakan hasil KMB, melainkan juga berasal dari dalam negeri. Pemerintah Belanda tidak bersedia menyelesaikan masalah Irian Barat (Papua sekarang) seperti yang disebutkan dalam isi perjanjian KMB. Sedangkan dari dalam negeri timbul masalah baru yang berkaitan dengan: (1) masalah integrasi, (2) masalah angkatan bersenjata, dan (3) masalah penolakan rakyat negara-negara bagian terhadap RIS (bentuk negara federasi).

#### **Tugas 4.1**

1. Sebutkan faktor-faktor yang mendorong Belanda untuk membentuk negara-negara boneka!
2. Mengapa sebagian besar Indonesia menolak Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)?

## **B. Kembali ke Negara Kesatuan**

Pada dasarnya, kesediaan delegasi Indonesia untuk menandatangani hasil-hasil KMB merupakan strategi untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Apabila Indonesia tidak mau menerima negara RIS, dikhawatirkan Belanda akan memperlambat atau bahkan tidak akan mengakui kedaulatan Indonesia. Hal itu dapat dimaklumi karena Belanda sangat berambisi untuk tetap mempertahankan kekuasaan seperti sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu, Belanda masih mengharapkan bisa menanamkan pengaruhnya melalui negara-negara boneka bentukan Belanda. Negara-negara boneka sebagai anggota RIS masih memiliki kedaulatan sehingga dapat menentukan garis politiknya. Kenyataan itulah yang menjadi keinginan Belanda agar tidak kehilangan pengaruhnya sama sekali dalam kehidupan politik dan ekonomi di wilayah Indonesia.

Itulah salah satu strategi yang ditempuh para pemimpin nasional dalam rangka mewujudkan NKRI. Berdasarkan Konstitusi RIS, Negara RIS terdiri dari tujuh negara bagian, sembilan satuan kenegaraan, dan tiga daerah swapraja sebagai berikut:

- a. Negara-negara bagian terdiri dari Republik Indonesia (RI), Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Indonesia Timur (NIT), Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan.
- b. Satuan kenegaraan terdiri dari Kalbar, Kaltim, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Bangka, Belitung, Riau Kepulauan, dan Jawa Tengah.
- c. Daerah swapraja yang terdiri dari Waringin, Sabang, dan Padang.

Bentuk negara federal, ternyata tidak memuaskan negara-negara, satuan kenegaraan, maupun daerah swapraja karena dianggap sebagai warisan pemerintah kolonial Belanda yang ingin tetap menjajah Indonesia. Negara federal juga tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang mendasarkan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping alasan itu, anggota RIS (kecuali RI) sedang mengalami berbagai kesulitan, baik dalam bidang politik pemerintahan maupun sosial ekonomi.



**Gambar. 4.2.** Sultan Hamid II adalah salah satu tokoh kaum federal yang pernah bersekongkol dengan Raymond Westerling untuk membantai rakyat di Sulawesi Selatan.

Secara politis, eksistensi beberapa negara bagian sangat sulit untuk dipertahankan karena pembentukannya atas prakarsa Belanda. Sedangkan dalam bidang ekonomi mereka harus menanggung hutang yang tidak kecil sehingga akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial rakyatnya. Beberapa negara bagian, satuan kenegaraan, dan daerah swapraja memiliki latar belakang pembentukannya yang berbeda-beda.

Di samping negara-negara bagian, beberapa daerah lain dinyatakan sebagai daerah otonom (satuan kenegaraan maupun daerah swapraja). Belanda sangat berharap bahwa daerah-daerah otonom itu akhirnya akan berdiri sebagai negara bagian. Salah seorang yang menjadi boneka Belanda dan sangat mendukung berdirinya RIS adalah Sultan Hamid II. Oleh karena itu, lahirnya RIS menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan angkatan bersenjata.

### 1. Faktor-faktor Pendorong

Sesuai dengan hasil KMB, RIS harus membayar hutang Belanda sejak tahun 1942 sampai pengakuan kedaulatan. Alasannya, semua hutang Belanda digunakan untuk kepentingan Hindia-Belanda. Sedangkan pihak RIS hanya bersedia menanggung hutang Belanda sampai Indonesia menyatakan kemerdekaan. Alasannya, apabila RIS harus menanggung hutang sampai tahun 1949 berarti RIS harus membiayai sendiri penyerangan-penyerangan Belanda terhadap Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan jalan buntu, terutama dalam menentukan tanggung jawab masing-masing negara bagian. Sementara, Amerika Serikat terus menekan agar RIS menanggung semua hutang Belanda.

Masalah di atas merupakan salah satu faktor yang mendorong timbulnya pemikiran untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Gerakan yang menginginkan bentuk negara kesatuan pun semakin meluas. Berbagai demonstrasi dan mosi yang menuntut agar negara-negara bagian RIS dilebur dan bergabung dengan Republik Indonesia guna membentuk negara kesatuan. Presiden NIT, Sukowati mengumumkan bahwa negara bagiannya siap menjadi unsur suatu negara kesatuan. Bahkan, 13 daerah di wilayah NIT, kecuali Maluku Selatan siap untuk

melepaskan diri dari NIT dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Tindakan itu kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya. Penggabungan antara daerah yang satu dengan lainnya dimungkinkan oleh pasal 43-44 Konstitusi RIS.

Para pendukung negara kesatuan dikenal sebagai kaum unitaris dan masyarakat yang menghendaki negara RIS dikenal sebagai kaum federalis. Semula, kedudukan kaum federalis cukup kuat untuk mempertahankan pandangannya. Akan tetapi, kekuatan itu mulai memburuk sebagai akibat beberapa tokohnya berkhianat terhadap RIS. Penghianatan mereka dikenal sebagai tindakan separatis. Beberapa tindakan separatis itu, di antaranya:

- a. Sultan Hamid II bersekongkol dengan Raymond Westerling untuk membunuh rakyat di Sulawesi Selatan, tentara di Bandung, dan mengancam akan membunuh para petinggi RIS di Jakarta. Kelompok ini menamakan diri Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) suatu gerakan separatis yang ingin mempertahankan negara Pasundan dan lepas dari RIS.
- b. Kapten Andi Aziz membuat makar di Makasar, Sulawesi Selatan. Ia dan pasukannya menyerang markas TNI di kota itu. Para prajurit TNI menjadi korban penyerangan itu. Pada tanggal 5 April 1950, Andi Aziz menyatakan NIT tetap dipertahankan.
- c. Dr. Soumokil memimpin gerakan separatis di Maluku Selatan. Gerakan ini dikenal sebagai Republik Maluku Selatan (RMS). Pada tanggal 25 April 1950, Soumokil memimpin pemberontakan terhadap RIS melalui berbagai intimidasi, teror, dan pembunuhan di beberapa tempat. Jelas, tindakan itu dapat menghambat upaya mewujudkan negara kesatuan, sekaligus menghancurkan RIS yang telah diakui dunia internasional.

Berbagai gerakan separatis tersebut telah melahirkan sikap tidak senang terhadap tokoh-tokoh kaum federalis dan mendorong mereka untuk mendukung

tokoh-tokoh kaum unitaris. Dengan demikian, gerakan separatis merupakan faktor yang ikut mendorong usaha-usaha perjuangan kembali ke negara kesatuan.

Faktor lain yang mendorong untuk kembali ke negara kesatuan adalah keinginan rakyat. Di berbagai daerah dilancarkan tuntutan pembubaran negara-negara bagian. Pada bulan Februari 1950, rakyat Jawa Barat melakukan demonstrasi di depan Parlemen Pasundan menuntut dibubarkannya negara Pasundan. Di Jawa Timur, rakyat berdemonstrasi menuntut dibubarkannya negara Jawa Timur. Tuntutan semacam

itu terus meluas di beberapa negara bagian maupun satuan kenegaraan (daerah-daerah otonom). Sampai tanggal 5 April 1950, negara-negara bagian dalam RIS



**Gambar. 4.3**  
*Demo menuntut Pembubaran Negara Pasundan*

tinggal tiga, yaitu RI, NIT, dan NST.

Beberapa daerah melancarkan mosi untuk melepaskan diri dari RIS dan bergabung dengan Republik Indonesia, di antaranya:

- a. Pada tanggal 4 Januari 1950, DPRD Malang mengajukan mosi untuk lepas dari Negara Jawa Timur dan masuk Republik Indonesia.
- b. Pada tanggal 30 Januari 1950, Sukabumi minta lepas dari Pasundan dan masuk menjadi bagian Republik Indonesia.
- c. Pada tanggal 22 April 1950, Jakarta Raya menggabungkan diri pada Republik Indonesia.
- d. Di Sumatera terjadi pergolakan politik di mana rakyat menuntut pembubaran Negara Sumatera Timur. Front Nasional Sumatera Timur dalam konferensinya pada tanggal 21 dan 22 Januari 1950 mengeluarkan resolusi yang antara lain menuntut supaya Negara Sumatera Timur selekas-lekasnya digabungkan kepada Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Sementara Negara Sumatera Timur dibubarkan dan diganti dengan Dewan Perwakilan Sumatera Timur yang demokratis.
- e. Di Sulawesi timbul gerakan-gerakan rakyat yang menuntut pembubaran negara Indonesia Timur dan sebelum RIS dengan resmi membubarkan negara Indonesia Timur terlebih dahulu mereka menggabungkan diri dengan Republik Indonesia.

## 2. Langkah Menuju ke Negara Kesatuan

Bertitik tolak dari keadaan di atas, pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS di Jakarta mengeluarkan UU Darurat No. 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Berdasarkan UU tersebut, beberapa negara bagian mulai menggabungkan diri dengan RI di Yogyakarta. Negara bagian RIS pun tinggal terdiri dari RI, NIT, dan NST.

Pada tanggal 19 Mei 1950, diadakan perundingan antara Pemerintah RIS yang diwakili Moh. Hatta setelah mendapat mandat dari NIT dan NST dengan Pemerintah RI diwakili oleh Abdul Halim, Wakil Perdana Menteri RI. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam piagam persetujuan yang berisi:

- a. RIS dan RI sepakat membentuk negara kesatuan berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
- b. RIS dan RI membentuk panitia bersama yang bertugas menyusun UUD negara kesatuan.

Untuk menyusun konstitusi negara kesatuan, dibentuklah panitia gabungan RIS-RI yang diketuai secara bersama-sama oleh Prof. Dr. Supomo (Menteri Kehakiman RIS) dan Abdul Halim (Wakil PM RI). Pada tanggal 21 Juli 1950, Pemerintah RIS dan RI berhasil menyepakati Rancangan UUD Negara Kesatuan.

Pada tanggal 14 Agustus 1950, Parlemen RI dan Senat RIS mengesahkan Rancangan UUD Negara Kesatuan menjadi Undang Undang Dasar Sementara



**Gambar. 4.4.**  
*Pelantikan Anggota DPR NKRI*

Tahun 1950 (UUDS 1950). Sehari kemudian, Presiden Soekarno membacakan piagam terbentuknya NKRI dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada hari itu juga Soekarno terbang ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan sebagai Presiden RI, yang sebelumnya dipangku oleh Mr. Asaat. Dengan demikian, sejak 17 Agustus 1950 negara RIS secara resmi dibubarkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil ditegakkan kembali. Keberhasilan itu merupakan bukti adanya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia.

## C. Pemilu 1955

Pemilihan Umum (Pemilu) yang pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu dilaksanakan dua tahap, yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Konstituante. Pemilu dilaksanakan dalam suasana kehidupan politik yang demokratis. Berdasarkan UUDS 1950, maka kehidupan politik di wilayah NKRI didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi liberal. Artinya, setiap partai politik dan perorangan pun harus diberi kebebasan untuk mengikuti Pemilu. Oleh karena itu, penentuan peserta Pemilu tanpa adanya verifikasi seperti sekarang.

### 1. Perkembangan Kepartaian

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang terdiri dari orang-orang yang memiliki pandangan, nilai-nilai, orientasi, dan cita-cita yang sama. Tujuan pembentukan partai politik adalah untuk merebut, memperoleh, dan/atau mempertahankan kekuasaan. Jadi, lahirnya kepartaian berkaitan erat dengan kekuasaan dalam suatu negara atau pemerintahan.

Perkembangan kepartaian di Indonesia telah dimulai pada masa Pergerakan Nasional. Pembentukan partai politik dipelopori para mahasiswa STOVIA di Jakarta. Sejak Budi Utomo berdiri pada tahun 1908, kemudian lahir partai-partai politik dengan tujuan yang berbeda satu sama lainnya. Salah satu kendala yang dihadapi partai politik pada waktu itu untuk mendapatkan badan hukum dari pemerintah Hindia Belanda. Mengapa? Belanda sangat khawatir terhadap berdirinya partai politik yang akan menjadi alat perjuangan rakyat. Pada tahun 1912, Sarekat Islam gagal mendapatkan badan hukum, apalagi Indische Partij yang dibubarkan pada tahun berdirinya.

Apabila dilihat dari sisi perjuangannya, partai-partai politik pada masa Pergerakan Nasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Partai yang bersifat radikal, seperti SI, PNI, PI, IP, dan PKI. Partai-partai ini tidak bersedia bekerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda dan mereka



menolak duduk dalam Dewan Rakyat (Volksraad).

- b. Partai yang bersifat moderat, seperti BU, Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), Parindra, Gerindo, dan Gapi. Mereka bersedia bekerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda dan bersedia duduk dalam Dewan Rakyat (Volksraad).

Dilihat dari segi ideologi, partai-partai itu dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, seperti:

- a. Agama (SI, SDI, PSII, Masyumi, Partai Katholik,),
- b. Nasionalis (BU, PNI, PBI, Parindra, IP, Gerindo, Gapi), dan
- c. Sosialis Marxis (ISDV, Partai Buruh Indonesia, dan PKI).

Pada masa pendudukan Jepang, semua partai politik dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Semua kekuatan harus ditujukan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Jepang hanya mengizinkan organisasi sosial keagamaan seperti Majelis Islamiah Ala Indonesia (MIAI). Ormas ini kelak berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), salah satu partai politik terbesar berdasarkan hasil Pemilu 1955.

Pasca kemerdekaan, Pemerintah RI memerlukan lembaga DPR/MPR sebagai cermin wakil rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Untuk itu, melalui Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945, pemerintah menghargai lahirnya partai politik sebagai bagian dari pembentukan DPR/MPR. Sejak saat itu, berdirilah partai-partai politik bagaikan jamur di musim penghujan. Adapun partai-partai politik yang lahir pasca kemerdekaan adalah:

- a. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang didirikan oleh dr. Sukiman pada tanggal 7 Nopember 1945.
- b. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin oleh Moh. Jusuf sejak tanggal 7 Nopember 1945.
- c. Partai Buruh Indonesia (PBI) yang dipimpin oleh Nyono dan didirikan pada tanggal 8 Nopember 1945.
- d. Partai Rakyat Jelata yang dipimpin oleh Sutan Dewanis dan didirikan pada tanggal 8 Nopember 1945.
- e. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang dipinim oleh Ds Probowinoto dan didirikan pada tanggal 10 Nopember 1945.
- f. Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dipinim oleh Mr. Amir Syarifuddin dan didirikan pada tanggal 10 Nopember 1945.
- g. Partai Rakyat Sosialis (PRS) yang dipinim oleh Sutan Syahrir dan didirikan pada tanggal 20 Nopember 1945.
- h. Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) yang dipinim oleh I.J. Kasimo dan didirikan pada tanggal 8 Nopember 1945.
- i. Partai Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) yang dipinim oleh J.B. Assa dan didirikan pada tanggal 17 Nopember 1945.
- j. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipinim oleh Didik Joyosukarto sejak 29 Januari 1946.

## 2. Pelaksanaan Pemilu

Beberapa kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal telah menetapkan Pemilu sebagai salah satu program kabinetnya. Pelaksanaan Pemilu merupakan konsekuensi dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Pada waktu itu, sebagian partai politik belum berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat karena lebih mementingkan para pemimpinnya. Kenyataan itu mengakibatkan kehidupan politik tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Kepincangan terjadi di sana sini sehingga rakyat menjadi frustrasi dan menuntut agar segera dilaksanakan Pemilihan Umum.

Persiapan pelaksanaan Pemilu telah dimulai pada masa pemerintahan Kabinet Ali-Wongso. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu dilaksanakan dua tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 dengan tujuan untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Majelis Rendah.
- b. Tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 dengan tujuan untuk memilih para anggota Konstituante atau Majelis Tinggi.

Dalam pelaksanaannya, Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 Kabupaten, 2.139 Kecamatan, dan 43.429 Desa. Pemilih yang datang untuk memberikan suara berjumlah 37.875.299 orang. DPR hasil pemilihan umum beranggotakan 272 orang, yaitu dengan perhitungan bahwa satu orang anggota DPR mewakili 140.000 orang penduduk, sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang.

Pemilu tersebut dinilai berlangsung secara tertib dan aman. Oleh karena itu, para pengamat dari luar yang datang ke Indonesia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu dengan baik. Sayangnya, Pemilu tersebut belum menghasilkan sebuah kemenangan mutlak bagi sebuah partai politik. Hal itu memang sulit karena peserta Pemilu sangat banyak jumlahnya, yaitu 28 kontestan. Dari hasil perhitungan suara telah muncul empat partai besar, yaitu PNI (57 kursi), Masyumi (57 kursi), NU (45 kursi), dan PKI (28 kursi).

Pemilu yang diikuti banyak partai sangat baik karena dapat menjamin pesta demokrasi yang benar-benar demokratis karena setiap orang memiliki pilihan yang cukup banyak. Artinya, masing-masing orang yang memiliki hak suara dapat menentukan partai yang paling sesuai ideologinya. Namun dilihat dari sisi hasilnya, pemilu yang diikuti banyak partai biasanya kurang menguntungkan usaha setiap partai politik untuk memperoleh suara mayoritas sangat sulit tercapai. Keadaan ini biasanya akan melahirkan pemerintahan yang lemah. Hal ini terbukti, ketika Konstituante gagal menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar untuk menggantikan UUDS 1950.

Di samping itu, upaya untuk membentuk pemerintah yang stabil sangat sulit direalisasikan. Hal ini dapat dilihat dari usia pemerintahan yang relatif singkat,

**Tabel 4.1**  
**Hasil Perolehan Suara dan Jumlah Kursi**  
**Masing-masing Partai Politik Untuk Anggota DPR**

Partai	Perolehan suara yang sah	%	Kursi di Parlemen Baru	Kursi di Parlemen Lama	Perolehan Suara
PNI	8.434.653	22.3		42	
Masyumi	7.903.886	20.9	57	44	9.070.218
NU	6.955.141	18.4	57	8	7.789.619
PKI	6.176.914	16.4	45	17	6.989.333
PSII	1.091.160	2.9	39	4	6.232.512
Parkindo	1.003.325	2.6	8	5	1.059.922
Partai Katolik	770.740	10	8	8	988.810
PSI	753.191	2.0	6	14	748.500
JPKI	541.306	1.4	5	-	695.932
Perti	483.014	1.3	4	1	544.803
PRN	242.125	0.6	4	13	465.359
Pw,ai Bumi-h	224.167	0.6	2	6	220.652
Murba	199.588	0.5	2	4	332.047
PIR (Wongnegoro)	178.481	0.5	1	1	248.633
PIR (Hazairin)	114.644	0.3	16	18	162.420
Lain-lain	2.712.964	7.3		46	101.509
<b>Jumlah</b>	<b>37.785.299</b>	<b>100</b>	<b>257</b>	<b>233</b>	

seperti:

1. Kabinet Burhanuddin Harapan (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956);
2. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 14 Maret 1957);
3. Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959).

Ternyata, usia Kabinet pasca Pemilu 1955 tidak jauh berbeda dengan usia Kabinet pada masa 1950 - 1955, seperti:

1. Kabinet M. Natsir (6 Oktober 1950 – 21 Maret 1951);
2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 23 Februari 1952);
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 2 Juni 1953);
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955).

Apabila dikaji secara cermat, maka persoalannya terletak pada sistem yang diterapkan tidak sesuai. Pada waktu itu, kita menganut sistem demokrasi liberal. Dengan demikian, upaya Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan langkah yang tepat. Apakah dengan adanya 'amandemen' dengan sisten 'adendum' terhadap UUD 1945 akan menghasilkan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih baik? Inilah salah satu persoalan yang harus dicermati dan dikritisi.

### Tugas4.3

**Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang dan kerjakan soal berikut ini!**

1. Apakah sistem banyak partai (multi party) dapat menjamin terwujudnya kehidupan yang demokratis!
2. Apakah sistem banyak partai dapat menjamin terwujudnya stabilitas nasional?
3. Mengapa tidak partai politik yang mampu memperoleh suara lebih dari 50%?

## D. Pembaruan Ekonomi Nasional

Kondisi perekonomian Indonesia yang buruk dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pelaksanaan sistem ekonomi kolonial, eksploitasi sumber daya alam pada masa pendudukan Jepang yang berorientasi pada kepentingan perang, atau sebagai akibat peperangan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Keadaan itu diperburuk dengan pelaksanaan taktik perang bumi hangus yang memporakporandakan dunia flora Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memperbaiki perekonomian dengan mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi.

Pada awal kemerdekaan, terjadi inflasi yang sangat tinggi sebagai akibat tak terkendalinya peredaran uang Jepang. Pemerintah belum bisa melarang peredaran uang Jepang karena belum memiliki mata uang sendiri. Pada waktu itu, pemerintah mengakui beredarnya tiga mata uang, yaitu:

1. Uang De Javanche Bank,
2. Uang Hindia Belanda, dan
3. Uang Jepang.

Keadaan perekonomian Indonesia semakin parah sebagai akibat blokade laut oleh Belanda. Tujuannya adalah ingin menghancurkan RI melalui senjata ekonomi. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan, Ir. Surachman merencanakan untuk mengeluarkan kebijakan pinjaman nasional dan telah disetujui oleh BP KNIP. Pinjaman itu diperkirakan mencapai Rp 1,000,000,000.00 yang dibagi menjadi dua tahap. Pinjaman itu akan dikembalikan dalam waktu 40 tahun. Kebijakan itu mendapat dukungan dari rakyat dengan bukti pemerintah mampu menghimpun tabungan rakyat sebesar Rp 500,000,000.00.

Ternyata, keadaan perekonomian tersebut terus memburuk karena berbagai kebijakan Belanda yang mencampuri urusan Indonesia. Misalnya, Belanda mengeluarkan uang NICA untuk mengganti Jepang. Sementara, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas baru, yaitu Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Kemudian pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) pada 5 Juli 1946, mendirikan Banking and Trading Corporation (BTC). Di samping itu, pemerintah berhasil menyelenggarakan Konferensi Ekonomi yang pertama. Konferensi ini menghasilkan beberapa kebijakan, seperti:

1. Pembentukan Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM) yang menjadi cikal bakalnya Bulog;
2. Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN);
3. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani.

Sejak pengakuan kedaulatan, pemerintahan Indonesia dihadapkan dengan masalah gawat yang bertalian dengan dipertahankannya dominasi Belanda atas ekonomi Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam KMB, pihak Indonesia telah menyetujui untuk menghormati hak-hak dan mengakui kepentingan-kepentingan perusahaan Belanda di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemerdekaan ekonomi belum tercapai karena beberapa sektor ekonomi Indonesia yang strategis masih dikuasai dan dikendalikan perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Ada lima perusahaan swasta Belanda yang memegang monopoli kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu:

1. Jacobson dan van den Berg,
2. Internatio,
3. Borneo-Sumatera Maatschappij (Barsumij),
4. Lindeteves, dan
5. Geo Wehry.

Kelima perusahaan itu sering disebut sebagai “the big five”, terutama karena sebagai pemegang monopoli kegiatan ekonomi Indonesia.

Berkaitan dengan keadaan tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk mengurangi kekuasaan perusahaan-perusahaan swasta Belanda dalam mengeksploitasi sumber alam Indonesia, dan sekaligus mendorong dan mendukung perkembangan perusahaan swasta pribumi Indonesia. Mereka berkeyakinan bahwa keadaan perekonomian Indonesia yang kurang menguntungkan pada revolusi fisik merupakan bukti pelaksanaan sistem ekonomi kolonial. Pada masa kolonial eksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia dilakukan oleh dan untuk kepentingan penjajah. Atas dasar pemikiran di atas, maka kepemilikan asing dan non pribumi, khususnya orang Belanda dan juga Cina atas aset-aset produktif Indonesia dan pengendalian ekonomi Indonesia harus dikurangi atau dihapus sama sekali.

Secara umum, bangsa Indonesia belum memiliki konsep pembangunan ekonomi nasional yang jelas. Beberapa pemimpin nasional yang berpengaruh menganjurkan pengembangan ekonomi nasional menurut pola sosialis untuk menggantikan struktur ekonomi kapitalis yang eksploitatif yang telah diwarisi dari zaman kolonial. Sementara, Dr. Sumitro Djojohadikusumo (Menkeu Kabinet Natsir) menyatakan bahwa pembaruan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional harus dilakukan dengan menghidupkan kegiatan perdagangan dan menumbuhkan kelas pengusaha.

Pada waktu itu, keadaan pengusaha pribumi sangat lemah dan pengusaha non pribumi sudah kuat kedudukan dan modalnya. Oleh karena itu, Sumitro menggagas gerakan benteng, yaitu melindungi pengusaha pribumi dalam

persaingan dengan pengusaha non pribumi dengan memberikan kredit. Berkaitan dengan gagasan tersebut, pemerintah mengucurkan dana pinjaman yang diberikan kepada 700 pengusaha pribumi. Di samping itu, pemerintah melaksanakan industrialisasi yang dituangkan dalam Rencana Sumitro, dengan sasaran:

- a. Mengembangkan industri dasar dengan mendirikan pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan.
- b. Meningkatkan produksi pangan, perbaikan prasarana, dan penanaman modal asing.

Usaha mengatasi krisis moneter dilakukan pula oleh Kabinet Sukiman dengan cara nasionalisasi De Javanche Bank. Kendati mengalami krisis moneter, pemerintah melalui Menteri Keuangan Yusuf Wibisono masih memberikan perhatian kepada para pengusaha dan pedagang nasional golongan ekonomi lemah. Dengan pemberian bantuan itu diharapkan para pengusaha yang merupakan produsen dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume import. Seiring dengan peraturan membagi dua uang kertas, diadakan pula peraturan sertifikat deviden, suatu usaha untuk memberikan dasar yang sewajarnya bagi nilai rupiah. Sertifikat-sertifikat itu tidak pernah diperjualbelikan sebagai kertas berharga yang sebenarnya. Nilainya ditentukan oleh bank dan uang yang diterimanya diberikan atau dibayarkan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Pada masa Kabinet Ali-Wongso, Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo melaksanakan sistem ekonomi baru yang disebut Sistem Benteng sebagaimana digagas oleh Sumitro Djojohadikusumo. Sistem ini sering disebut sebagai Sistem Ali-Baba. Ali untuk menggambarkan pengusaha pribumi, sedang Baba untuk menggambarkan pengusaha non pribumi, khususnya Cina. Menurut Iskaq, pengusaha pribumi harus bekerja sama dengan pengusaha non pribumi dalam memajukan perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan menyediakan kredit melalui bank. Namun, sistem mengalami kegagalan karena pengusaha non pribumi lebih piawai dari pengusaha pribumi.

Akibat sanering uang yang dilakukan pemerintah pada zaman Ir. Djuanda, yaitu penarikan uang dari peredaran. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan berhasil menarik sekitar Rp 1,5 milyar. Dengan uang itu dapatlah pemerintah membayar sebagian utangnya kepada Bank Sentral, untuk membiayai defisit anggaran. Pemerintah selalu mengambil uang muka dari De Javanche Bank (kini Bank Indonesia). Melalui cara tersebut sebagian uang muka dapat dibayar kembali. Dengan demikian, penyelesaian utang pemerintah dilakukan dengan pinjaman 'paksaan'.

Pada masa demokrasi liberal, Indonesia sering ditimpa gelombang pemogokan. Walaupun begitu perdagangan luar negeri masih berkembang baik. Bahkan, waktu itu Indonesia mampu membeli valuta asing sebagai simpanan. Simpanan valuta ini dapat dijual kembali, jika keadaan memaksa seperti pada pertengahan bulan Nopember 1952 Indonesia mulai menjual emasnya. Merosotnya cadangan emas itu menyebabkan nilai dasar barang ekspor Indonesia

menjadi buruk. Di samping itu, untuk mengurangi inflasi pemerintah harus menyediakan barang sebanyak-sebanyaknya.

*Tanjung Morawa adalah suatu daerah kecamatan di Sumatera Timur di mana terdapat perkebunan yang dimiliki oleh asing, khususnya tembakau. Pada jaman Jepang, perkebunan itu ditinggalkan oleh kontraktornya dan oleh rakyat (dengan dorongan Jepang) perkebunan ini digarap untuk tanaman bahan makanan. Atas dasar isi perjanjian KMB, para kontraktor menuntut kembali hak atas tanah perkebunannya, dan pemerintah Republik Indonesia menyetujui tuntutan mereka. Karena tanah perkebunan itu dapat menghasilkan devisa yang diperlukan, maka kesanggupan pemerintah untuk menjamin modal asing yang ditanam di Sumatera Timur tadi diharapkan akan menarik lebih banyak modal asing yang ditanam di Indonesia. Petani banyak yang protes, tetapi disambut polisi dengan tembakan yang menyebabkan beberapa petani tewas.*

Usaha pemerintah Indonesia untuk menuju ekonomi nasional, ternyata tidak mudah. Adanya peristiwa Tanjung Morawa (tahun 1952) menyebabkan Kabinet Wilopo jatuh. Peristiwa Tanjung Morawa menimbulkan heboh yang demikian besar. Jatuhnya Kabinet Wilopo dan munculnya kabinet baru di bawah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo I menandakan suatu tahap baru dalam kebijaksanaan anti penanaman modal asing yang lebih militan. Hal ini antara lain terlihat dari usaha "Indonesianisasi" yang lebih intensif, misalnya dengan bantuan pemerintah Indonesia kepada pengusaha-pengusaha pribumi untuk mengambil alih bagian yang lebih besar dari berbagai kegiatan ekonomi, seperti perdagangan impor, perbankan, perkapalan dan penggilingan beras, yang dikuasai kepentingan ekonomi Belanda dan Cina.

Sebagai daerah bekas jajahan Belanda, Indonesia tidak memiliki banyak ahli, sehingga usaha mengganti sistem ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak menghasilkan perubahan yang berarti. Hal tersebut mendorong lahirnya berbagai kebijakan pemerintah mengalami defisit keuangan sehingga cenderung melahirkan kebijakan untuk mencetak uang baru yang menimbulkan inflasi. Inflasi dapat menghambat produksi dikarenakan adanya kenaikan upah. Pemimpin-pemimpin nasional yang lebih pragmatis menyadari bahwa PMA baru memang harus ditarik ke Indonesia untuk mengembangkan sumber-sumber daya alam Indonesia dan mendirikan industri modern yang disertai berbagai amandemen.

Undang-Undang PMA melarang PMA dalam beberapa kegiatan ekonomi, seperti pekerjaan umum, pertambangan, dan lapangan usaha lainnya di mana umumnya pengusaha-pengusaha pribumi bergerak. Meskipun pemilikan saham mayoritas tidak dilarang, namun Undang-Undang PMA ini menegaskan bahwa usaha patungan dengan mitra Indonesia akan diberikan prioritas. Situasi politik yang kacau, dan terutama nasionalisasi semua perusahaan Belanda bertalian dengan konflik mengenai status Irian Barat, jelas tidak menguntungkan usaha-usaha menarik arus PMA baru ke Indonesia. Malahan keadaan politik yang makin radikal dan makin anti kehadiran PMA di Indonesia, maka pada tahun 1959 Presiden Sukarno mencabut UU PMA tahun 1958. Usaha perjuangan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, dilancarkan pula lewat bidang ekonomi. Pada tanggal 18 Nopember 1957 diadakan rapat umum di Jakarta. Rapat umum ini kemudian diikuti dengan aksi pemogokan total oleh kaum buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda. Pada tahun 1957 pemerintah segera mengambil tindakan antara lain :

1. Melarang beredarnya semua terbitan dan film yang berbahasa Belanda,

2. Penerbangan Belanda KLM dilarang mendarat dan terbang di atas wilayah Indonesia,
3. Mulai 5 Desember 1957 semua kegiatan Konsul Belanda di Indonesia diminta dihentikan.

Setelah itu terjadi pengambilalihan (nasionalisasi) modal dan berbagai perusahaan milik Belanda, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Berhubung waktu itu dalam keadaan darurat, militer berperan besar dalam nasionalisasi. Beberapa contoh perusahaan yang diambilalih oleh Indonesia antara lain :

- a. Perbankan seperti Nederlansche Handel Maatschappij (namanya kemudian menjadi Bank Dagang Negara).
- b. Perusahaan Listrik Phillips.
- c. Beberapa perusahaan perkebunan.

#### **Tugas 4.4**

1. Sebutkan 3 (tiga) hambatan yang dihadapi Pemerintah RI dalam melaksanakan pembaruan Ekonomi Nasional?
2. Sebutkan 3 (tiga) strategi yang ditempuh Pemerintah RI untuk membangun Ekonomi Nasional!

## **E. Dekrit Presiden 5 Juli 1959**

### **1. Sidang-sidang Konstituante**

Tujuan Pemilu tahun 1955 adalah membentuk DPR dan Konstituante. Salah satu tugas Konstituante adalah menyusun atau merumuskan Rancangan Undang-Undang Dasar (Rancangan UUD) sebagai pengganti UUDS 1950. Sesuai dengan sifatnya yang sementara, maka UUDS 1950 harus diganti dengan UUD yang bersifat tetap. Oleh karena itu, setelah sukses membentuk Konstituante melalui Pemilu 1955, maka Konstituante diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara baik. Untuk itu, para anggota Konstituante mulai bersidang pada tanggal 10 Nopember 1956. Sidang Konstituante yang dilaksanakan di Bandung dipimpin oleh Wilopo SH, dan telah dibuka secara resmi dengan Pidato Presiden Soekarno. Namun dalam kenyataannya, sampai tahun 1958 Konstituante belum berhasil merumuskan Rancangan UUD sebagaimana yang diharapkan.

Kegagalan Konstituante untuk merumuskan Rancangan UUD bukan karena para anggota Konstituante tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya, melainkan karena terjadinya perbedaan pendapat di antara para anggota Konstituante mengenai isi Rancangan UUD. Oleh karena itu, Sidang Konstituante cenderung dijadikan arena perdebatan antara para anggota Konstituante. Masing-masing anggota cenderung mengutamakan kepentingan partainya dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.



Para anggota Konstituante terpecah menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok Islam dan kelompok non Islam (nasionalis dan sosialis). Ternyata, antara kedua kelompok tersebut tidak pernah tercapai kata sepakat mengenai isi Rancangan UUD. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila Konstituante, akhirnya gagal melaksanakan tugasnya. Dalam membangun kehidupan yang demokratis, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Namun, bukan berarti masing-masing pribadi, kelompok, golongan, dan/atau partai dapat memaksakan kehendaknya.

Setiap perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu, menyalahkan demokrasi liberal sebagai penyebab kegagalan Konstituante melaksanakan tugasnya merupakan pemikiran yang kurang bijaksana. Toh negara-negara Barat, demokrasi liberal dapat dilaksanakan secara baik. Namun, adanya pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia patut untuk dihargai.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka persoalan yang paling mendasar sebenarnya terletak pada kesadaran masing-masing dalam menempatkan kepentingan pribadi dan kepentingan umum (bangsa dan negara). Selama kepentingan pribadi diletakkan di atas segala-galanya, maka demokrasi model manapun tidak akan berhasil membangun kehidupan yang demokratis. Oleh karena itu, demokrasi harus diartikan sebagaimana pengertian dasarnya, yaitu kekuasaan rakyat. Artinya, masing-masing pihak harus dapat menerima pendapat pihak lain. Dengan kata lain, apabila kepentingan bangsa dan negara diletakkan di atas segala-galanya, niscaya kehidupan yang demokratis dapat diwujudkan.

Seiring dengan kegagalan Konstituante merumuskan Rancangan UUD, di luar ruang Sidang Konstituante berkembang pemikiran-pemikiran yang semakin kuat untuk kembali ke UUD 1945. Pawai, rapat umum, petisi, dan demonstrasi yang menuntut agar UUD 1945 diberlakukan kembali dilancarkan di mana-mana. Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan untuk kembali ke UUD 1945 dan pelaksanaan demokrasi terpimpin.

Keinginan-keinginan untuk kembali ke UUD 1945 mendapat dukungan dari pimpinan ABRI (dalam hal ini Mayor Jenderal A.H. Nasution). Kemudian pimpinan ABRI menggerakkan Dewan Menteri untuk mendesak Konstituante agar segera menetapkan UUD 1945 secara konstitusional. Dewan Menteri mengadakan sidang pada tanggal 19 Februari 1959 dan menghasilkan keputusan mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945.

Keputusan Dewan Menteri itu mengandung tiga hal pokok, yaitu: (1) tentang UUD 1945, (2) prosedur kembalinya ke UUD 1945, dan (3) tentang masuknya golongan fungsional ke dalam DPR. Artinya, perlu adanya pengangkatan calon anggota DPR dari partai politik dan dari golongan fungsional yang penempatannya diselang-seling secara bergantian. Di samping itu, diusulkan untuk mengangkat anggota DPR dari Golongan ABRI oleh Presiden. Sementara, untuk membantu tugas-tugas Presiden perlu dibentuk Front Nasional dengan Keputusan Presiden.

Berdasarkan perkembangan tersebut, pada tanggal 25 April 1959 Presiden

Soekarno menyampaikan amanat di depan Sidang Konstituante yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Amanat Presiden itu diperdebatkan dalam Konstituante dan akhirnya diputuskan untuk melakukan pemungutan suara sesuai dengan pasal 137 UUDS 1950. Pemungutan suara pun dilaksanakan sampai tiga kali, namun gagal mencapai dua pertiga (2/3). Dengan demikian, upaya untuk menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 secara konstitusional mengalami kegagalan. Terjadilah suasana yang menegangkan dan ada partai politik yang menyatakan tidak mau datang lagi ke Sidang Konstituante.

Menanggapi perkembangan yang terjadi di dalam Konstituante, maka Presiden Soekarno menganggap situasi yang terjadi sebagai keadaan darurat. Itulah situasi yang melatarbelakangi dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

## 2. Keluarnya Dekrit Presiden

Setelah Konstituante gagal menetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan secara resmi di Istana Merdeka pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00. Adapun isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut:

- a. Pembubaran Konstituante.
- b. Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
- c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Tanggapan terhadap Dekrit Presiden adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian besar masyarakat mendukung penetapan dekrit oleh Presiden Soekarno.
- b. Kasad memerintahkan kepada seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengamankan pelaksanaan dekrit tersebut.

c. Mahkamah Agung membenarkan dekrit tersebut,  
d. DPR secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Pernyataan DPR ini disampaikan dalam sidang tanggal 22 Juli 1959.



**Gambar. 4.5**  
*Presiden Soekarno sedang Membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959*

### 3. Penbentukan MPRS

Sebelum ada MPR yang tetap sesuai dengan UUD 1945, Presiden Soekarno membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri dari 261 orang anggota DPR, 94 orang anggota Utusan Daerah, dan 200 orang anggota Wakil Golongan. Susunan pimpinan MPRS adalah sebagai berikut:

Ketua : Chaerul Saleh.  
Wakil Ketua : Mr. Ali Sastroamidjojo.  
Wakil Ketua : K.H. Idham Khalid.  
Wakil Ketua : D.N. Aidit.  
Wakil Ketua : Kolonel Wiluyo Puspoyudo.

### 4. Pembentukan DPAS

DPAS dibentuk dengan berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Beberapa hal yang diketahui berkaitan dengan Penetapan Presiden tersebut, seperti:



**Gambar. 4.6**

*Mr. Sartono selaku Ketua DPR sedang menghadap Presiden Soekarno guna membicarakan tindak lanjut Dekrit Presiden 5 Juli 1959*

- a. Anggota DPAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- b. Anggota DPAS berjumlah 45 orang, yang terdiri dari 12 orang wakil golongan politik, 8 orang utusan daerah, 24 wakil golongan dan satu orang ketua;
- c. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah;
- d. DPAS dipimpin oleh presiden sebagai ketua;
- e. Sebelum memangku jabatan,

Wakil Ketua dan anggota DPAS mengangkat sumpah/janji di hadapan presiden;

- f. DPAS dilantik pada pada tanggal 15 Agustus 1945.

#### Tugas 4.5

Jelaskan situasi yang melatarbelakangi dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959!

## RANGKUMAN

Pengakuan kedaulatan merupakan salah satu persyaratan formal berdirinya suatu negara, di samping wilayah dan rakyat. Secara de facto, Indonesia telah merdeka pada tanggal 17-8-1945. Secara de jure, kemerdekaan itu harus mendapat pengakuan dari negara-negara lain, terutama Belanda.

Pengakuan Belanda atas kedaulatan RI masih sangat terbatas karena RI hanya diakui sebagai bagian dari RIS.

Terbentuk RIS tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI dan keutuhan NKRI belum dapat diwujudkan. RIS memberi peluang kepada Belanda untuk menanamkan pengaruhnya, baik di bidang politik maupun ekonomi.

Rakyat menuntut pembubaran RIS dan kembali ke NKRI sehingga melahirkan instabilitas politik. Meskipun demikian, pemerintah berhasil menyelenggarakan Pemilu yang pertama.

Pemerintah melaksanakan pembangunan politik dan ekonomi, meskipun hasilnya masih jauh dari harapan masyarakat. Keadaan ini semakin tidak menguntungkan bagi keutuhan NKRI.

Untuk mengatasi krisis yang terus menerus, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

## REFLEKSI

1. Setelah kalian mempelajari Bab ini, apakah kalian sudah dapat memahami berbagai peristiwa politik dan ekonomi yang terjadi antara tahun 1950 sampai 1959. Apakah dampak peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi yang terjadi selama demokrasi liberal? Apabila kalian belum memahami, apa yang akan kalian lakukan? Apabila sudah, apa yang harus kalian lakukan?
2. Setelah kalian memahami peristiwa-peristiwa tersebut, apakah kalian dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa-peristiwa itu? Apakah yang akan kalian lakukan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah yang harus dilakukan pemerintah RI untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, adil, makmur, dan sejahtera?

Di samping DPAS, pada tanggal 15 Agustus itu juga telah dilantik Ketua Dewan Perancang Nasional yaitu Mr. Moh. Yamin dan Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

## EVALUASI

### A. Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling tepat

1. Konferensi Meja Budar (KMB) menghasilkan keputusan penting, di antaranya:
  - a. Pengembalian hak milik Indonesia yang dirampas Belanda
  - b. Pengakuan kedaulatan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia
  - c. Indonesia dan Belanda sepakat untuk menghentikan peperangan
  - d. Belanda siap menarik seluruh tentaranya dari wilayah RI
2. Indonesia menyatakan kembali ke Negara Kesatuan sejak 17 Agustus 1950 karena:
  - a. Semua negara anggota RIS mendukungnya
  - b. Sistem federasi sebaiknya dilaksanakan di negara-negara liberal
  - c. NKRI sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI 17-8-1945
  - d. Negara-negara bagian tetap dikendalikan oleh Belanda
3. Jatuhnya Kabinet Sukiman-Suwiryo pada tanggal 23 Februari 1952 karena:
  - a. Tidak tahan menghadapi partai-partai oposisi
  - b. Dianggap condong ke Blok Barat
  - c. Belum mampu melaksanakan politik bebas aktif
  - d. Tidak mendapat kepercayaan dari DPR
4. Kabinet pertama yang memerintah Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah:
  - a. Kabinet Natsir
  - b. Kabinet Wilopo
  - c. Kabinet Sukiman-Suwiryo
  - d. Kabinet Ali Sastroamidjojo
5. Sesudah Pemilu 1955, instabilitas politik Indonesia terus berlangsung karena:
  - a. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya
  - b. Pemilu 1955 dianggap tidak demokratis
  - c. Adanya pertentangan antara Presiden dan DPR
  - d. Masa keanggotaan Konstituante telah habis
6. Sistem banyak partai sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia karena:
  - a. Terlalu banyak partai politik yang menjadi peserta Pemilu
  - b. Sulit membangun partai politik yang kuat dan didukung oleh rakyat
  - c. Pemerintah yang stabil tidak dapat diwujudkan

- d. Peluang terjadinya pertentangan antar partai semakin terbuka
- 
- 7. PRRI merupakan salah satu pergolakan yang terjadi di daerah:
    - a. Sulawesi
    - b. Kalimantan
    - c. Jawa
    - d. Sumatera
  
  - 8. Pemilu 1995 menghasilkan 4 (empat) partai besar, kecuali:
    - a. Partai Nasional Indonesia (PNI)
    - b. Partai Indonesia Raya (Parindra)
    - c. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
    - d. Nahdatul Ulama (NU)
  
  - 9. Salah satu faktor yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:
    - a. Untuk menciptakan pemerintahan yang stabil
    - b. Untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945
    - c. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya
    - d. Terjadinya pertentangan antara para anggota Konstituante
  
  - 10. Pembentukan MPRS dan DPAS sangat konstitusional karena:
    - a. Sesuai dengan UUDS 1950
    - b. Sesuai dengan hak prerogatif Presiden
    - c. Sesuai dengan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
    - d. Sesuai dengan UUD 1945

**B. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat**

1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal .....  
.....
2. Seringnya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal (1950-1959) sebagai akibat adanya persaingan antara ..... dengan  
.....
3. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan pada masa pemerintahan kabinet .....  
.....
4. Berdasarkan hasil Pemilu 1955, partai politik yang memperoleh kursi paling banyak di Konstituante adalah .....
5. Cangkraningrat adalah kepala negara dari negara bagian .....

**C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara singkat**

1. Sebutkan 3 (tiga) sebab terjadinya instabilitas pemerintahan pada masa demokrasi liberal (1950-1959)!
2. Sebutkan 3 (tiga) sebab pemerintah RI tidak dapat membangun perekonomian nasional yang mantap pada tahun 1950-1959!
3. Mengapa Konstituante tidak dapat menyusun Rancangan Undang-Undang?
4. Sebutkan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959!
5. Bagaimanakah pendapat kalian terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin? Jelaskan jawaban kalian!

